

## DAFTAR PUSTAKA

### **Dari Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan:**

*Vienna Convention on Law of Treaties 1969*

*United Nation Convention on Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*

*United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995*

*International Maritime Organization (IMO) Flyers Nomor 79*

*Concept Paper for the Establishment of an ASEAN Defence Ministers' Meeting*

*Concept Paper on ADMM-Plus Principles for Membership*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 25 (A)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Peraturan Pemerintah  
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif  
Indonesia (ZEEI)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Konservasi Sumber Daya Alam  
Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka  
Panjang Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara  
Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina  
Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan  
(*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and  
the Government of the Republic of the Philippines on Cooperative  
Activities in the Field of Defense and Security*)

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang-Undang Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Pengelola Perbatasan
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional *commit to user*

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan  
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Lampiran Peraturan Menteri KP Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum  
Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau  
Kecil Dan Kawasan Perbatasan

Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang  
Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu  
Di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan

**Dari Buku:**

Bakorkamla. 2009. *Hukum Laut, Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan  
Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*. Jakarta : Bakorkamla.

\_\_\_\_\_. 2009 *Kewenangan dan Identitas Lembaga Penjaga Laut dan Pantai  
sebagai Penegak Hukum Keselamatan*. Jakarta : Bakorkamla.

Dedi Supriyadi. 2013. *Hukum Internasional (dari Konsep sampai Aplikasi)*.  
Bandung : Pustaka Setia.

Dikdik Mohamad Sodik. 2011. *Hukum Laut Internasional*. Bandung : Refika  
Aditama.

Dimiyati Harto Nomor 1977. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta : Bhatara Karya  
Aksara.

FX. Adjie Samekto. 2009. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*.  
Bandung : Citra Aditya.

Ghufran, M. 2012. *Ekosistem Mangrove Potensi, Fungsi, dan Pengelolaan*.  
Jakarta : PT. Rineka cipta.

Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*.  
Bandung : Refika Aditama.

J.G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kent Booth. 1977. *Navies and Foreign Policies*. Crane, Russak : New York.

Malcolm N. Shaw QC. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung : Nusa Media.

Mukti Fajar, Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan  
Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Fajar.

- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soni Sumarso Nomor 2012. *Kebijakan Umum Pengelolaan Lintas Batas Negara*. Buku 1. Jakarta : BNPP.
- Sugiyono Nomor 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung : Alfabeta.
- Suryawan Hidayat. 2013. *Rencana Strategis Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara*. Jakarta : BNPP
- Susanto & Dicky R Munaf, 2015. *Komando Dan Pengendalian Keamanan Dan Keselamatan Laut*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

**Dari Jurnal:**

- Emmers, R. and Tan, S. S., 2009. "The ASEAN Regional Forum and Preventive Diplomacy: A Failure in Practice". *RSIS Working Paper*. Nomor 189. Singapore : S Rajaratnam School of International Studies.
- Lemhanas. 2012. "Penataan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI", *Jurnal Kajian Lemhanas RI*. Edisi 14. Jakarta : Biro Humas Settama Lembaga Pertahanan Nasional.
- Popi Tuhulele. 2011. "Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi". *Jurnal Perspektif*. Volume XVI Nomor 3. Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan, UIN Sunan Gunung Djati
- Schofield, C. 2012. "Parting the Waves: Claims to Maritime Jurisdiction and the Division of Ocean Space". *Penn State Journal of Law & International Affairs*. Volume 1. Pennsylvania: Penn State's School of Law and School of International Affairs.

Tsamenyi,M.,Hanich,Q. 2012. “Fisheries jurisdiction under the Law of the Sea Convention: rights and obligations in maritime zones under the sovereignty of Coastal States”. *International Journal of Marine and Coastal Law*. 27 April 2012, 783-793.

Wikanti Asriningrum. 2011. “Analisis Wilayah Konservasi Mangrove di Kepulauan Talaud”. *Globe Volume* 13 Nomor 2. Bogor : Badan Informasi Geospasial.

Yovanca Koondoko, 2017, “Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, Volume 4 Nomor 1, Bali : Program Studi Masgister (S2) Kajian Pariwisata Universitas Udayana.

**Dari Makalah, Tulisan Hukum dan Artikel:**

Menteri Kelautan & Perikanan. 2017. Kebijakan Pembangunan Kelautan & Perikanan di Indonesia. *Paparan*. Disampaikan pada Rakornas Bidang Kemaritiman, pada tanggal 4 Mei 2017 di Jakarta.

Menteri Perhubungan. 2016. Konektivitas Untuk Peningkatan Layanan Logistik. *Paparan*. [https://www.transport-supplychain-logistics.co.id/RXID/RXID\\_ITSC/2016/pdf/Budi\\_Karya\\_Sumadi\\_MinistryofTransportation.pdf?v=636149750718124923](https://www.transport-supplychain-logistics.co.id/RXID/RXID_ITSC/2016/pdf/Budi_Karya_Sumadi_MinistryofTransportation.pdf?v=636149750718124923)>

\_\_\_\_\_. 2017. Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman. *Paparan*. Disampaikan pada Rakornas Bidang Kemaritiman, pada tanggal 4 Mei 2017 di Jakarta.

**Dari Internet:**

Admin Bakamla. 2016. Bakamla akan Lengkapi Diri dengan Pesawat Nirawak. [http://bakamla.go.id/home/artikel\\_lengkap/2144/a9a9f9b90c5d410c1bae50f482d75a9e](http://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/2144/a9a9f9b90c5d410c1bae50f482d75a9e)> (25 Juli 2017 pukul 11.00).

Admin Media Center. 2016. *Rajawali 350. Rahasia Dibalik Kecanggihannya Drone Helikopter Bakamla RI*. <https://yonkav7.mil.id/rajawali-350-rahasia-commit-to-user>

[dibalik-kecanggihan-drone-helikopter-bakamla-ri.html](#)> (25 Agustus 2017, Pukul 06.33).

Admin Web Bea dan Cukai. 2015. Tambahan Kapal Patroli Bantu Bea Cukai Perkuat Pengawasan Laut. <http://www.beacukai.go.id/berita/tambahan-kapal-patroli-bantu-bea-cukai-perkuat-pengawasan-laut.html>> (25 Agustus 2017, Pukul 07.45).

---

. 2017. *Tingkatkan Keamanan Perairan Indonesia Timur, Bea Cukai Gelar Operasi Patroli Laut Jaring Wallacea 2017*. <http://www.beacukai.go.id/berita/tingkatkan-keamanan-perairan-indonesia-timur-bea-cukai-gelar-operasi-patroli-laut-jaring-wallacea-2017.html>> (26 Juli 2017 pukul 08.55).

Bakosurtanal. 2014. *Indonesia Memiliki 13.466 Pulau Yang Terdaftar dan Berkoordinat*. <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-urta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat>> (23 Desember 2014 pukul 22:51).

Bobby. 2017. *Antisipasi Masuknya ISIS, Polda Sulut Kirim Pasukan ke Perbatasan Filipina*. [http://www.rri.co.id/post/berita/397533/nasional/antisipasi\\_masuknya\\_isis\\_polda\\_sulut\\_kirim\\_pasukan\\_ke\\_perbatasan\\_filipina.html](http://www.rri.co.id/post/berita/397533/nasional/antisipasi_masuknya_isis_polda_sulut_kirim_pasukan_ke_perbatasan_filipina.html)> (26 Juli 2017 pukul 09.02).

BPPKI Manado. 2017. *Kunjungan Kerja Menteri Komunikasi dan Informatika di Sulawesi Utara*. <https://balitbangsdm.kominfo.go.id/berita-kunjungan-kerja-menteri-komunikasi-dan-informatika-di-sulawesi-utara-19-302>> (26 Juli 2017 pukul 10.05)

Ditjen Perhubungan Laut. 2014. *Tugas dan Fungsi*. <http://hubla.dephub.go.id/unit/kplp/Pages/Tugas-Fungsi.aspx>> (25 Juli 2017 pukul 16.30).

Ditjen Perhubungan Udara. 2017. *Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII*. <http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/1976>> (26 Juli 2017 pukul 10.04)

- Dispenal Mabasal. 2017. *TNI AL Gelar Patroli Terkoordinasi PHILINDO XXXI 2017*.  
<http://www.tnial.mil.id/News/OperasiLatihan/tabid/80/articleType/ArticleView/articleId/37331/Default.aspx>> (25 Juli 2017 pukul 13.00).
- Edwin JH. Wuisang. 2013. *Membangun Wilayah Perbatasan*.  
<http://old.setkab.go.id/artikel-7605-komitmen-pemerintah-membangun-wilayah-perbatasan.html>> (08 Januari 2015, pukul 14.58).
- Haryo Adjie. 2016. *Rajawali 350: Rahasia Dibalik Kecanggihan Drone Helikopter Bakamla RI*. <https://yonkav7.mil.id/rajawali-350-rahasia-dibalik-kecanggihan-drone-helikopter-bakamla-ri.html>> (25 Juli 2017 pukul 12.00).
- Humas DJPL. 2016. *Kemenhub Kerahkan 9 Kapal Amankan Paskah di Larantuka*. <http://dephub.go.id/berita/baca/kemenhub-kerahkan-9-kapal-amankan-paskah-di-larantuka/>> (25 Juli 2017 pukul 09.55).
- Humas KKP. 2017. *[FILLER] Indonesia dan Inggris Luncurkan Proyek KKP–UKSA–INMARSAT*. <http://news.kkp.go.id/index.php/filler-indonesia-dan-inggris-luncurkan-proyek-kkp-uksa-inmarsat/>> (26 Juli 2017 pukul 08.00).
- Humas Laut. 2017. *Ditjen HUBLA Evaluasi Performa Trayek T-5 Tol Laut di Pelabuhan Tahuna*. <http://hubla.dephub.go.id/berita/Pages/DITJEN-HUBLA-EVALUASI-PERFORMA-TRAYEK-T-5-TOL-LAUT-DI-PELABUHAN-TAHUNA.aspx>> (26 Juli 2017 pukul 10.00).
- Kemlu Indonesia. 2015. *ASEAN Regional Forum (ARF)*.  
<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/ARF.aspx>> (26 Juli 2017 pukul 09.10).
- KKP RI. 2017. *VMS Perkuat Pengawasan Illegal Fishing*.  
<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/vms-perkuat-pengawasan-illegal-fishing/>> (25 Agustus 2017, Pukul 06.55).
- PSO BC Pantoloan. 2016. *FAQ*. <http://psopantoloan.beacukai.go.id/faq.html>> (26 Juli 2017 pukul 08.49).

United Nations. 2017. *Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements.*

[http://www.un.org/depts/los/reference\\_files/chronological\\_lists\\_of\\_ratifications.html](http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.html)> (25 Desember 2014, Pukul 1:12).

